

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SORONG

Andriani Karto

Dosen STIE Bukit Zaitun Sorong

Abstract: *This study aims to determine the effect of general allocation funds towards regional economic growth Sorong, West Papua Province. Based on this goal, then the collection of data from various sources on the development of general allocation funds and the regional gross domestic product, during the period 2004 - 2013. The data were collected, and then analyzed using simple linear regression analysis. The analysis showed that the regression coefficient is positive, meaning that the general allocation fund positive effect in improving regional economic growth Sorong. The very strong influence marked with a coefficient of determination of 92.9%, and significantly smaller sig.0,000 where the value of alpha 0.05, which indicates that the positive effect of significantly funding public locations or can significantly increase economic growth Sorong regency.*

Keywords: *general allocation fund, economic growth, regional gross domestic income.*

PENDAHULUAN

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik” secara material maupun spiritual.

Agar pembangunan dapat terlaksanakan dan memberikan hasil yang optimal, maka diperlukan suatu dokumen rencana strategis (renstra) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program-program pembangunan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan renstra dikaji dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu pertumbuhan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi. Alkadri (1999) meneliti sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

Indonesia selama periode 1969-1996. Variabel penjelas yang digunakan sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi adalah aliran neto utang luar negeri pemerintah dan swasta, realisasi investasi swasta asing dan swasta domestik yang disetujui, ekspor dan impor barang, tabungan pemerintah dan swasta, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Solow–Swan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1997:57). Pandangan ini mengartikan bahwa sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung penambahan produk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Todaro (1997:105) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dipengaruhi oleh akumulasi modal yang mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik, dan semua sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi.

Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah terus meningkat hampir di segala macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Peranan pengeluaran pemerintah terletak pada laju pertumbuhan ekonomi, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran serta mendorong usaha sektor swasta.

Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah mengelola pembangunan menjadi lebih baik, akurat dan tepat. Desentralisasi atau pelimpahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimulai sejak tahun 2001, dimana dalam bidang keuangan, pemerintah pusat wajib menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat melakukan transfer ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti; dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH). Semua dana tersebut disalurkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dana alokasi umum (DAU) bersifat hibah umum (*block grant*) sehingga pemerintah daerah (PEMDA) memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Kabupaten Sorong sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, juga mendapat dana alokasi umum (DAU), sehingga diharapkan dana tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkecil pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Realisasi DAU untuk Kabupaten Sorong tahun 2004 sebesar Rp.138.238.000,- meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp.414.440.517.000,- dan pada

tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp.465.669.519.000. Artinya bahwa terjadi peningkatan DAU Kabupaten Sorong. Peningkatan DAU dari tahun ke tahun harus dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong.

Besar kecilnya DAU yang diterima, ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD). Jika PAD rendah maka jumlah DAU dalam pemanfaatannya sebagian besar (75%) digunakan untuk belanja kebutuhan pegawai dan sisanya untuk membangun sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pasar, jalan dan jembatan, dan sebagainya.

Harus diakui bahwa pendelegasian kewenangan yang disertai penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal bisa terjadi perbedaan dan keragaman antar pemerintah daerah. Perbedaan ini pada akhirnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan bertumbuh dan berkembang apabila ada pertumbuhan *output*.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam pasal 7 dikatakan bahwa besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Yani, 2002).

Menurut Bastian (2003:84), dana alokasi umum adalah dana perimbangan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Kemudian Sidik (2002:155) menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya

sangat signifikan dimana penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Sama halnya dengan Halim (2002:160) bahwa dana alokasi umum berasal dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.

Apa yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah dana alokasi umum sesuai dengan alokasinya. Artinya bahwa “pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan” (Musgrave, 1973).

Oleh karena itu pengelolaan anggaran untuk kepentingan publik lebih mengarah pada masalah yang bersentuhan dengan kepentingan publik seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan masyarakat, sehingga pada akhirnya anggaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara transparansi kepada yang berwenang. Tentunya dengan harapan bahwa anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pembangunan selanjutnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi ataukah tidak (Arsyad, 1999). Sedangkan Sukirno (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut pandangan ekonom klasik bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabene merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian, termasuk di daerah. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) menurut harga

konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita alam jangka panjang. Penekanan pada “proses” karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indicator pertumbuhan ekonomi niasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah dapat dinilai efektivitasnya.

Peningkatan pendapatan daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapata asli daerah (PAD). Ini berarti bahwa pemerintah daerah seharusnya berkonsentrasi memberdayakan kekuatan ekonomi local untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada suatu daerah berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah.

Pertumbuhan tersebut akan terjadi apabila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan investasi berarti secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan porsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor produktif di daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberi arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat pengaruh yang positif secara langsung antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian dana lebih dioptimalkan dalam bentuk anggaran modal dalam APBD untuk menambah asset

METODE

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder periode 2004 sampai tahun 2013. Data sekunder tersebut adalah dana alokasi umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Sorong. Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDRB selama tahun penelitian harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung PDRB menurut harga konstan (PDRB) riil.) Di mana, PDRB riil berdasarkan harga konstan dihitung dengan rumus:

$$\text{PDRB riil} = \frac{\text{PDRB atas Harga Berlaku}}{\text{Indeks Harga Konsumen}} \times 100\%$$

Kemudian data PDRB riil diolah untuk memperoleh data laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB riil tahun ini} - \text{PDRB tahun lalu}}{\text{PDRB riil tahun lalu}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan *output* dalam jangka panjang yang mana diukur dengan perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong yang diukur dengan perkembangan PDRB dari tahun ke tahun adalah perubahan PDRB yang digunakan berdasarkan atas harga konstan. Untuk mengukur pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi, maka digunakan analisis regresi linier sederhana dengan rumus:

$$Y = a + \beta X + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

a = Konstanta

X = Dana alokasi umum

β = Koefisien regresi

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan DAU dan PDRB Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 13.603,46 kilometer persegi dengan luas lautan 514,65 kilometer persegi dan luas daratan 845,71 kilometer persegi serta memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong.

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara memberikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan UU nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka daerah memiliki kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk mengelola keuangan daerahnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi UU nomor 33 Tahun 2004 berupaya mendorong kemandirian pengelolaan keuangan daerah yang dititikberatkan pada kemandirian memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik (*public service*).

Penerapan UU nomor 33 Tahun 2004 dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indikator pencapaian meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan yang demokratis, dan adanya pemerataan dapat dilihat dari nilai PDRB yang dicapai dan proyeksinya serta nilai pendapatan per kapita yang meningkat. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila SKPD memperhatikan konsep *Value For Money*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang didasari oleh konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik yang dapat tercapai apabila pemerintah daerah di dukung oleh sistem akuntansi yang baik.

Keberhasilan pengelolaan pembangunan daerah dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain meliputi: (1) Indikator penerimaan pajak (*tax effort*) yaitu yang terkait dengan *revenue*; (2) Indikator investasi pemerintah yang terkait dengan *expenditure*; (3) Indikator dana perimbangan yang berhubungan erat dengan *depedency* terhadap *external source*.

Indikator dana perimbangan dimana Pemerintah Kabupaten Sorong menetapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan identifikasi beberapa sumber penerimaan baru beserta strategi pencapaiannya yang berpotensi sebagai pemacu peningkatan pendapatan (*income generation*) yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah serta dengan melakukan pengeluaran sesuai dengan kemampuan fiskal daerah yang memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparansi dan akuntabilitas, serta keadilan dan kepatutan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, yang salah satunya adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi umum (DAU).

Kabupaten Sorong sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, juga mendapat dana alokasi umum (DAU), sehingga diharapkan dana tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkecil pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Realisasi DAU untuk Kabupaten Sorong tahun 2004 sebesar

Rp.138.238.000,- meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp.414.440.517.000,- dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp.465.669.519.000. Artinya bahwa terjadi peningkatan DAU Kabupaten Sorong. Peningkatan DAU dari tahun ke tahun harus dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong.

Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari adanya peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunan, secara umum terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) Listrik dan air minum; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) Jasa-jasa.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sorong

SEKTOR	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata2
Pertanian	5.05	-1.31	3.77	4.65	1.34	5.72	5.84	4.38	4.33	3.63	3.74
Pertambangan	3.39	-26.38	0.10	-1.24	3.01	-0.52	-2.73	8.80	-1.35	-6.71	-2.36
Industri	42.03	0.16	-3.50	7.45	9.80	10.66	4.06	4.63	1.44	0.64	8.74
Listrik, gas	2.92	4.42	2.94	3.35	4.83	5.37	5.58	6.00	6.42	5.08	4.69
Konstruksi	46.13	5.63	5.07	6.94	7.75	9.05	11.99	12.20	12.17	8.11	12.50
Perdagangan	2.49	10.14	2.49	3.39	6.19	4.08	5.34	5.46	6.27	6.05	5.19
Pengakutan	6.35	9.48	6.20	7.07	6.80	9.24	9.85	10.29	10.48	8.49	8.42
Jasa perusahaan	9.50	19.74	-7.75	18.38	36.06	24.34	6.62	8.04	13.63	16.35	14.49
Jasa-jasa	-8.18	16.57	8.46	10.06	4.69	7.45	12.56	12.61	9.57	7.05	8.09
PDRB	9.84	-11.66	0.39	3.13	4.98	4.60	2.47	7.28	2.07	-0.61	2.25

Sumber: BPS Kabupaten Sorong, 2014

Tabel 1 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan akibat dari perubahan produksi serta harga dan barang dan jasa. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong sebesar 9,84%, tapi pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong mengalami peningkatan sebesar -11.66%, tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong mengalami penurunan sebesar 0,39 %, tahun 2007 pertumbuhan ekonomi kabupaten sorong mengalami peningkatan sebesar 4,98%, kemudian pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong mengalami penurunan sebesar 4,98%, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sorong mengalami penurunan sebesar 4.60%, dan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Sorong mengalami penurunan sebesar 2.47% kemudian di ikuti dengan tahun 2011 pertumbuhan Kabupaten Sorong mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7.28%, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.07%. Dan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar - 0.61%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong ini menunjukkan padat tahun ke tahun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong . Jika dilihat dari sektor primer, sektor sekunder dan tersier maka dari tahun 2005 ke tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong sangat bervariasi pertumbuhannya.

Estimasi Model Regresi

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong. Hasil tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Analisis Regresi

Variabel Independen	Simbol Variabel	Koefisien Regresi	r^2	Sig.
Dana Alokasi Umum	X	0.028	0,929	0,000
Konstanta (koefisien intersep) = 6,645				

Sumber : data primer, diolah

Informasi penting sehubungan dengan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

1. Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel tersebut adalah $Y = 6,645 + 0,028X$. Persamaan ini menunjukkan koefisien regresi positif, artinya dana alokasi umum berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong. Dalam hal ini apabila dana alokasi umum meningkat 1% maka akan mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong sebesar 2,8% dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).
2. Kemudian koefisien determinasi 0,929 atau 92,9% menunjukkan bahwa menunjukkan kemampuan variabel dana alokasi umum menjelaskan variasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong sebesar 92,9% dan sisanya sebesar 7,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian

ini. Kondisi ini mencerminkan bahwa peranan dana alokasi umum sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hasil uji signifikansi dimana nilai sig.0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh positif dana lokasi umum secara signifikan atau secara nyata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi positif, artinya dana alokasi umum berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong. Pengaruh tersebut sangat kuat ditandai dengan koefisien determinasi 92,9%, dan signifikan dimana nilai sig.0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 yang menunjukkan bahwa pengaruh positif dana lokasi umum secara signifikan atau secara nyata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sorong.

Oleh karena pengaruh DAU positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka perlu perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Sorong untuk lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan mengoptimalkan sumber penerimaan dana alokasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, (1997). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ketiga, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- _____, (1999). *Pengantar perencanaan dan Pembangunan*, Edisi pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sorong Dalam Angka*, berbagai terbitan: Kabupaten Sorong.
- Gujarati, Damodar, N., (2003). *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc. Graw _ Hill International Edition.
- Hukom, Alexandra, (2004). "Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM Yogyakarta* (tidak dipublikasikan).
- Jones, Bernard, (1996). *Financial Management in the Public sector*, Mc-Graw Hill Companies, England.

- Mangkoesoebroto, Guritno, (1993). *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta
- Suparmoko, M., (1987). *Keuangan Negara, dalam Teori dan Praktek*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Buduouse Media Rajawali Pres, Jakarta
- Todaro, MP., 1997. *Economic Development*, seventh edition, Longman Inc., England.
- Todaro. 2005. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Taringa, Robinso. 2007. *Ekonomi Regional Teori Aplikasi*, PT. Bumi Angkasa, Cetakan Keempat, Jakarta
- Wijaya, Faried, (1999). *Pengantar Ekonomika Makro*, Edisi Ketiga Penerbit BPFE Yogyakarta.